

Bab 1,4,&5 Andre

by Andre Z

Submission date: 11-Jun-2024 08:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 2400008913

File name: Fisip_1112000194_Andre_Zakarino_Muhammad..pdf (650.84K)

Word count: 8284

Character count: 54622

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di negara berkembang seperti Indonesia ini permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan signifikan yang harus dihadapi. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014, kemiskinan adalah isu mendesak yang membutuhkan penanganan secara sistematis dan menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar mereka melalui pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sehingga tercipta kehidupan yang bermartabat bagi seluruh warga negara. Kemiskinan yang ditandai dengan rendahnya pendapatan dan konsumsi masyarakat menjadi peristiwa penting dalam bidang ekonomi dan berfungsi sebagai tolak ukur utama dalam bidang tersebut.

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Kecamatan Jambangan menunjukkan ketidakseimbangan dalam akses masyarakat terhadap sumber daya dasar. Meskipun ada sedikit penurunan persentase, data statistik menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya. Ini menunjukkan bahwa kita harus melakukan lebih banyak untuk mengatasi kemiskinan. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin Kota Surabaya mencapai 152,49 ribu, naik sebesar 6,82 ribu dari angka 145,67 ribu pada Maret 2020. Garis Kemiskinan (GK) Kota Surabaya meningkat pada tahun 2019 dari Rp567.474,- per bulan, meningkat lebih dari 37 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi jumlah penduduk miskin menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin berkurang lebih dari 10 ribu orang, hampir mencapai 131 ribu orang sekitar 4,51 persen dibandingkan dengan Tahun 2018 yang hampir mencapai 141 ribu orang. Ada indikasi perbaikan dalam hal kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan seiring dengan penurunan persentase penduduk miskin. Hal ini tercermin dalam penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 0,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 0,62 poin. Ini menunjukkan adanya penurunan yang kecil namun signifikan dalam kedalaman kemiskinan di Kota Surabaya.

Hingga saat ini, masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Jambangan. Seperti halnya, meskipun pengawasan sasaran program sudah tepat sasaran di Kecamatan Jambangan, beberapa orang

miskin yang masih belum mendapatkan program tersebut dan sangat membutuhkannya, sehingga tidak merata sampai semua orang mendapatkan program tersebut. Selain itu, program PKH di Kecamatan Jambangan kurangnya transparansi tentang apa yang didapat dari program tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari cara Dinas Sosial memberikan bantuan PKH di Kecamatan Jambangan dan bagaimana hal itu berdampak pada penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut.

Selain itu, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Kota Surabaya juga menurun, menunjukkan perbaikan. Ini ditunjukkan oleh penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sekitar 0,05 poin menjadi 0,15 poin dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018. Ini menunjukkan upaya untuk mengurangi disparitas pengeluaran di antara kelompok miskin, dan menunjukkan tanda-tanda bahwa upaya untuk mengurangi ketimpangan di kelas masyarakat yang rentan berhasil. Data ini menunjukkan bahwa, meskipun Garis Kemiskinan naik pada tahun 2019, upaya-upaya yang dilakukan telah menghasilkan penurunan jumlah penduduk miskin, dan ada indikasi peningkatan dalam mengurangi kedalaman dan ketimpangan kemiskinan di Kota Surabaya.

Kondisi ini mencerminkan masalah besar, terutama dalam hal memberikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas tinggi. Keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka karena keterbatasan akses ini. Diharapkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) akan membawa perubahan besar dalam konteks ini. PKH bukan sekadar program bantuan keuangan; itu melibatkan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti memberikan bantuan keuangan kepada keluarga yang kurang mampu, meningkatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, dan memberikan pendampingan yang berkelanjutan.. Pendekatan ini tidak hanya menyediakan bantuan langsung, tetapi juga membantu orang untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan meningkatkan peluang mereka. Program Keluarga Harapan (PKH) menawarkan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang telah diidentifikasi. Program Conditional Cash Transfers (CCT), yang telah dimulai sejak tahun 2007, telah terbukti efektif dalam mengatasi kemiskinan, terutama kemiskinan kronis, yang masih menjadi masalah besar di Indonesia.

Sesuai dengan amanat konstitusi dan program Nawacita Presiden RI, Program Keluarga Harapan (PKH) membantu keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak, untuk mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang ada di sekitar mereka. Program ini juga telah diperluas untuk mencakup orang lanjut usia dan penyandang disabilitas dengan tujuan menjaga kesejahteraan mereka. Tujuan

utama PKH adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang semakin penting mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia yang terus meningkat. Pada maret 2016, tingkat kemiskinan mencapai 10,86% dari total penduduk atau sekitar 28,01 juta orang (sumber: BPS,2016). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, pemerintah menetapkan target untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019. PKH diharapkan dapat membantu mencapai target tersebut, menurunkan rasio gini atau kesenjangan sosial serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil meningkatkan konsumsi keluarga penerima manfaat sebesar 4,8% di Indonesia menandakan dampak positif terhadap perubahan konsumsi di tingkat rumah tangga. Selama pelaksanaan, jumlah penerima manfaat dan alokasi anggaran terus meningkat setiap tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2018 tercatat ada 10.000.232 juta keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17,5 Triliun. Keluarga penerima manfaat menerima bantuan finansial yang terdiri dari Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing keluarga. Bantuan ini mencakup bantuan reguler hingga bantuan khusus untuk ibu hamil, anak usia dini, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia.

Tidak hanya memberikan bantuan keuangan, PKH juga mengharuskan KPM memenuhi kewajiban tertentu, seperti mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan. Kewajiban kesehatan ini termasuk memeriksa kandungan ibu hamil, memberi mereka nutrisi yang baik dan imunisasi, dan melacak perkembangan anak balita. Di bidang pendidikan, ini mencakup pendaftaran dan kehadiran anggota keluarga PKH di satuan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan mereka.

PKH diharapkan menjadi pusat utama dalam penanggulangan kemiskinan yang mengintegrasikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial di seluruh negeri. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mendorong keluarga penerima manfaat untuk menjadi lebih mandiri dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. PKH di Kecamatan Jambangan bukan hanya harapan. Program ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat selama eksistensinya. Misalnya, dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, kita bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membuka pintu ke lebih banyak peluang di masa depan. PKH diharapkan dapat menjadi tonggak yang memungkinkan keluarga untuk mencapai kemandirian finansial, seperti yang dilakukan pemberdayaan ekonomi keluarga. Lebih dari sekadar statistik, PKH diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Harapan mereka bukan hanya untuk mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan langsung, tetapi juga

untuk memberi semua warga Kecamatan Jambangan kesempatan yang lebih adil. Diharapkan bahwa program ini akan mendorong perubahan, membantu orang-orang dan membantu mereka menjadi lebih produktif dan mandiri. PKH memfasilitasi perubahan yang berkelanjutan dengan menekankan pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap sumber daya dasar. Ia adalah langkah konkret menuju perbaikan struktur ekonomi dan sosial yang akan berdampak jauh ke depan, bukan hanya solusi temporer. Program ini bukan hanya harapan itu adalah pondasi yang kokoh untuk perubahan yang lebih baik yang melibatkan semua orang di Kecamatan Jambangan.

¹¹ 1.2 Rumusan Masalah

- ¹² 1. Bagaimana peran pendamping PKH terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat bagi dinas sosial terhadap PKH dalam penanggulangan tingkat kemiskinan di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

- ¹² 1. Untuk mengidentifikasi peran Dinas Sosial terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat bagi dinas sosial terhadap PKH dalam penanggulangan tingkat kemiskinan di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.

¹⁹ 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat praktis dan teoritis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian saat menyajikan hasil dalam bentuk teks atau tulisan. ¹⁴
- b. Untuk dapat menerapkan pengetahuan teoritis yang dipelajari di bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai Program Keluarga Harapan Dalam Menyejahterakan masyarakat.

b. Bagi Dinas Sosial

Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan PKH berjalan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Wilayah Administratif Kecamatan Jambangan Kota Surabaya

Kecamatan Jambangan merupakan wilayah dataran rendah dan memiliki luas wilayah 4.19 Km². Kecamatan Jambangan ini terdiri dari 4 Kelurahan, 26 RW, dan 138 RT. Kecamatan Jambangan terdapat 4 batas wilayah yakni :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Wonokromo
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Gayungan
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Karang Pilang
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Sidoarjo

Kecamatan Jambangan adalah bagian penting dari Kota Surabaya. Jambangan memiliki sejarah, keanekaragaman budaya, dan dinamika perkembangan kota yang luar biasa. Kecamatan Jambangan terletak di Jalan Jambangan Sawah No.2 dan sebelah barat daya dari pusat kota dan terdiri dari perumahan padat hingga kawasan industri yang signifikan. Jambangan menunjukkan kehidupan kota yang beraneka ragam dengan populasi yang beragam, termasuk penduduk lokal dan migran. Dalam hal sejarah, Jambangan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pertumbuhan Kota Surabaya sebagai pusat perdagangan dan perindustrian. Daerah Jambangan ini dulunya tempat para pedagang dan pengusaha berkumpul, dan sekarang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang aktif. Rumah-rumah klasik dan struktur bersejarah yang tersebar di seluruh kota menunjukkan sisa-sisa sejarah. Jambangan memiliki pesona alami. Meskipun berada di tengah permukiman perumahan, terdapat taman dan ruang terbuka yang menawarkan tempat untuk bersantai. Taman Jangkar dan Taman Asmaul Husna adalah tempat favorit orang Jambangan untuk berkumpul, berolahraga, atau hanya menikmati udara segar. Dan juga ada Pasar Rakyat Jambangan merupakan salah satu tempat kulineran atau berbagai macam variasi kuliner makanan khas ataupun makanan tradisional yang membuat daya tarik masyarakat untuk membeli kuliner di tempat Pasar Rakyat Jambangan tersebut. Meskipun memiliki banyak aspek yang berbeda, Kecamatan

Jambangan tetap menjadi bagian penting dari Kota Surabaya. Dan Jambangan menjadi pusat aktivitas ekonomi dan budaya Kota Surabaya.

4.1.2 Data Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Per Kelurahan di Kecamatan Jambangan

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Per Kelurahan di Kecamatan Jambangan Tahun 2023

Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Jambangan	0,08	11.720	146.475
Kebonsari	0,09	11.475	127.478
Karah	0,12	15.825	131.858
Pagesangan	0,10	14.627	146.250
Jumlah	0,39	53.647	552.061

Sumber data : Kecamatan Jambangan

Dilihat dari tabel data di atas adalah data jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Jambangan pada Tahun 2023 peneliti mendapatkan data tersebut dari Kesra Jambangan langsung saat melakukan wawancara. Dan dalam satu tahun terakhir dari 2024 sekarang yaitu pada tahun 2023 total jumlah penduduk di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya mengalami kenaikan signifikan. Dimana pada tahun 2023 jumlah penduduk tertinggi diperoleh dari Kelurahan Karah berjumlah 15.825 penduduk (jiwa). Dan jumlah penduduk terendah diperoleh dari Kelurahan Kebonsari berjumlah 11.475 penduduk (jiwa). Sedangkan luas wilayah yang terbesar diperoleh dari Kelurahan Karah dengan luas 0,12 Km² dan kepadatan penduduk terbesar juga diperoleh dari Kelurahan Jambangan dengan jumlah 146.475 jiwa/km².

33 4.1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jambangan Kota Surabaya

2
Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya nomor 94 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan Kota Surabaya yang dimaksud pada Bab III Tugas dan Fungsi pasal 7 ayat :

1. Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dan Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
 - g. Membina dan mengawasi kegiatan di Kelurahan
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang ada di kecamatan
 - i. Melaksanakan tugas tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
 - j. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
3. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh Perangkat Kecamatan
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis
- b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
- f. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya nomor 94 tahun 2021, yang dimaksud bab III Tugas dan Fungsi pasal 10 ayat :

- 1) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang sekretariat yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat
 - b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penanganan masalah hukum
 - e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan resiko

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya nomor 94 tahun 2021, yang dimaksud bab III Tugas dan Fungsi pasal 11 ayat :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di sub bagian umum dan kepegawaian

- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan koordinasi penanganan masalah hukum

1

2. Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di sub bagian keuangan
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di sub bagian keuangan
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran/perubahan anggaran
- e. Melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan

2

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya nomor 94 tahun 2021, yang dimaksud bab III Tugas dan Fungsi pasal 12 ayat :

1

1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di seksi pemerintahan dan pelayanan publik
- b. Menyiapkan bahan program kerja dan petunjuk teknis di seksi pemerintahan dan pelayanan publik
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
- d. Melaksanakan pemantauan dan pengoordinasian di bidang pertanahan dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- e. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan

1

2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di seksi ketentraman dan ketertiban umum
- b. Menyiapkan bahan program kerja dan petunjuk teknis di seksi ketentraman dan ketertiban umum
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

- d. Membantu pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
- e. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum

1

3) Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

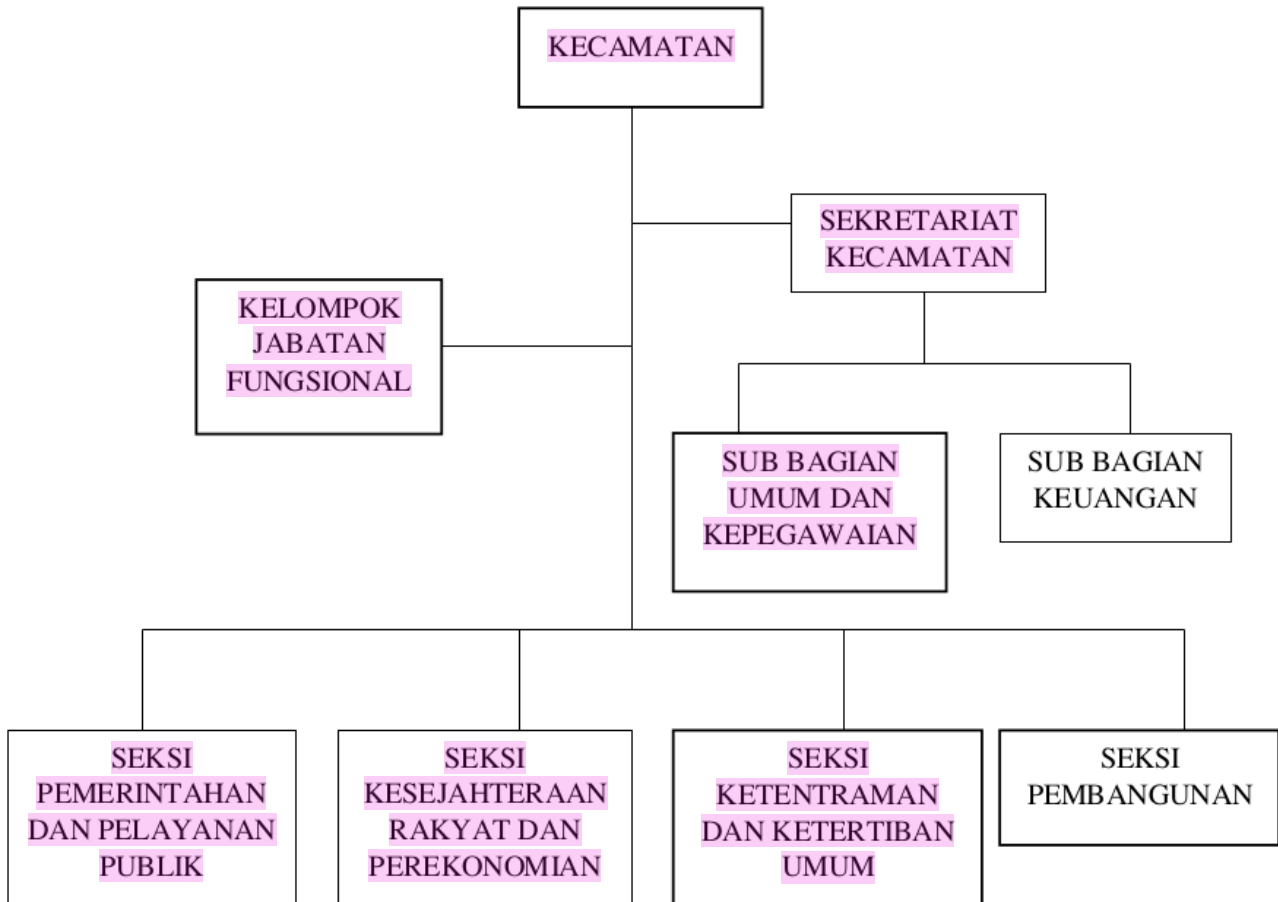
- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di seksi kesejahteraan rakyat dan perekonomian
- b. Menyiapkan bahan program kerja dan petunjuk teknis di seksi kesejahteraan rakyat dan perekonomian
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
- d. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin

1

4) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di seksi pembangunan
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di seksi pembangunan
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
- d. Melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di seksi pembangunan

² Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya nomor 94 tahun 2021, Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dapat digambarkan pada bagan berikut ini :



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Jambangan

Sumber : Kecamatan Jambangan

4.2 Penyajian Data

Salah satu bagian penting dalam pembuatan laporan hasil penelitian adalah penyajian data. Kegiatan ini merupakan bagian dari laporan penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan sesuai dengan analisis data yang diharapkan. Data yang telah dianalisis atau disajikan harus mudah dipahami, jelas dan mudah dibaca. Penyajian data ini diperoleh melalui wawancara dengan informan serta penggunaan data dan dokumentasi yang ada di lapangan.

Adapun data yang peneliti analisa yaitu data jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk per kelurahan di Kecamatan Jambangan pada tahun 2023 dan data komponen program PKH. Selain data tersebut peneliti juga menyebutkan beberapa informan wawancara saat terjun ke lapangan. Berikut adalah daftar nama-nama informan wawancara yakni :

Tabel 4.2 Daftar Informan Wawancara

No.	Nama Informan	Kedudukan (Status) Informan
1	Ibu Haryanti, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian Kecamatan Jambangan
2	Kakak Dara	Pendamping PKH Jambangan-Kebonsari
3	Kakak Devita	Pendamping PKH Pagesangan
4	Kakak Ari	Pendamping PKH Karah
5	Ibu Tutik	Masyarakat Penerima Bantuan PKH
6	Ibu Yuni	Masyarakat Penerima Bantuan PKH
7	Ibu Anjar	Masyarakat Penerima Bantuan PKH

Sumber : Penulis mengelola sendiri

Dari tabel Daftar Informan Wawancara di atas, peneliti dapat mengumpulkan informasi dan sumber data terkait Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Dengan hal ini, peneliti dapat menganalisa dan menarik kesimpulan untuk menjadikan hasil penelitian tersebut.

4.2.1 Peran Aktif

a. Menyampaikan informasi tentang program PKH

Keberhasilan program bantuan PKH ²¹ tidaklah lepas dari peran aktif kasi kesra, pendamping PKH dan masyarakat penerima bantuan PKH, oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar pendamping dengan masyarakat. Peran aktif yang dimaksud dimana berkontribusi aktif dalam program bantuan PKH.

Pada tahap ini peneliti mewawancarai dengan informan untuk mengetahui bagaimana menyampaikan informasi tentang program PKH. Berikut responden dari Haryanti selaku Kasi Kesra Kecamatan Jambangan

“Di kecamatan ini ⁴⁶ kami mempunyai nama yakni Kepanjang Tangan Kesra guna menyampaikan informasi tentang program PKH kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan kesra-kesra kelurahan.”
(wawancara : 25 April 2024)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Devita selaku Tim Pendamping PKH

“kalau sosialisasi penyampaian informasi terkait program PKH biasanya koordinasi dengan RT-RW di kelurahan mas dan itu kegiatannya sebulan sekali.” (wawancara : 26 April 2024)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Yuni selaku Masyarakat Penerima Bantuan PKH

“jadi mas, informasi PKH itu saya dapat informasi dari RT setempat dan juga ada kegiatan sosialisasi tentang informasi bantuan PKH di kelurahan selama sebulan sekali mas.” (wawancara : 17 Mei 2024)

⁶ Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa peran aktif dari masyarakat dalam kontribusi program PKH sangat bermanfaat dan di dampingi oleh Tim Pendamping PKH guna berperan aktif dalam mendampingi masyarakat penerima bantuan PKH. Serta peran aktif dari Kasi Kesra Kecamatan ini memberikan informasi program PKH kepada masyarakat dan selalu berkoordinasi dengan kesra-kesra kelurahan dengan membuat kegiatan sosialisasi di kelurahan selama sebulan sekali.

b. Mengikuti dan mendukung pelaksanaan program PKH

Mengikuti dan mendukung pelaksanaan program PKH ini²⁵ bisa dideskripsikan sebagai bentuk proses perencanaan yang sudah terlaksana sesuai dengan prosedur²⁵ yang ada, dengan berdasar dan juga tetap sasaran sesuai dengan keinginan masyarakat penerima bantuan PKH. Dalam hal ini peran aktif pendamping dan masyarakat dalam mengikuti dan mendukung pelaksanaan program PKH.

³ Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan informan untuk mengetahui bagaimana peran aktif pendamping dan masyarakat dalam mengikuti dan mendukung pelaksanaan program PKH. Berikut responden dari Ari selaku Tim Pendamping PKH

“Peran aktif kita (pendamping) sangat mengikuti dan mendukung dalam pelaksanaan program bantuan PKH ini, sehingga untuk pelaksanaan terjun survei nya ada beberapa komponen diantaranya anak sekolah, lansia, balita, ibu hamil, dan disabilitas. Oleh karena itu, kita (pendamping) ini mendampingi masyarakat penerima PKH dalam penyaluran bantuan melalui PT.Pos dan Bank BNI.” (wawancara : 26 April 2024)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Haryanti selaku Kasi Kesra Kecamatan Jambangan

“Peran saya sangat mendukung akan program PKH untuk masyarakat yang benar benar membutuhkan dan juga pihak kecamatan berperan aktif dalam semuanya mulai dari pemberdayaan ekonomi, sosial, masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.” (wawancara : 25 April 2024)

Namun pernyataan yang serupa disampaikan oleh Anjar selaku Masyarakat penerima bantuan PKH

“Peran saya sebagai masyarakat penerima bantuan sangat mendukung pelaksanaan program PKH ini guna membantu perekonomian keluarga saya dan saya juga mengikuti sosialisasi PKH di kelurahan mas.” (wawancara : 19 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan tersebut bahwa pelaksanaan program PKH ini sangat mendukung dan berkontribusi aktif pada program PKH bagi masyarakat penerima bantuan PKH dan pendamping PKH.

Pihak kecamatan pun juga aktif mendukung dan mengikuti pelaksanaan program PKH. Dan juga berdasarkan hasil observasi masyarakat juga aktif dalam mengikuti sosialisasi program PKH yang diadakan di kelurahan Jambangan.

c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PKH

Kasi Kesra Kecamatan berperan aktif dalam mengkoordinasikan serta mendukung pelaksanaan program PKH termasuk menyediakan sumber daya yang diperlukan. Namun, masyarakat penerima bantuan PKH juga terlibat dalam memonitor dan melaporkan setiap permasalahan yang terjadi sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas. Tim pendamping PKH juga melakukan proses monitoring dilakukan secara terus menerus melalui kunjungan rumah penerima bantuan, rapat koordinasi rutin, dan pelaporan berkala oleh pendamping PKH. Berikut pernyataan dari Haryanti selaku Kasi Kesra Kecamatan

“Untuk monitoring dan evaluasi program kami (kecamatan) berkoordinasi dengan kesra per kelurahan dan tim pendamping PKH sehingga pelaksanaan dan perencanaan kegiatan dari semuanya itu dievaluasi dan dimonitoring secara seksama dan berkesinambungan.”
(wawancara : 25 April 2024)

Namun, pernyataan serupa dari Dara selaku Tim Pendamping PKH

“Kalau monitoring dan evaluasi itu biasanya tiap pencairan kita (pendamping) datang ke rumah-rumah penerima bantuan berdasarkan dari data BNBA nya. Jadi nanti kita bagi per RT RW keliling ke rumah nya untuk foto orangnya di depan rumah terus kita pastikan orangnya ada disitu.” (wawancara : 26 April 2024)

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Tutik selaku Masyarakat Penerima Bantuan PKH

“Saya juga dimonitor dan di koordinator sama tim pendamping PKH nya ke rumah saya mas dan di data bantuan PKH serta mendampingi ke penyalurannya ke Bank BNI nya mas.” (wawancara : 13 Mei 2024)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut bahwa peran aktif dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKH di kecamatan Jambangan sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai dengan

efektif dan efisien. Keterlibatan masyarakat yang berkontribusi aktif, proses monitoring yang terstruktur, dan evaluasi yang menyeluruh dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang muncul sehingga program dapat memberikan manfaat bagi keluarga penerima bantuan PKH.

4.2.2. Peran Partisipatif

a. Berpartisipasi masyarakat dengan pendamping PKH dalam pengembangan program PKH

Keberhasilan program PKH di kecamatan Jambangan ini bergantung⁴⁸ da partisipasi masyarakat dengan pendamping PKH. Namun masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, akan tetapi juga berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan PKH. Tiap bulannya pendamping PKH mengadakan sosialisasi dengan masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi keluarga penerima manfaat dan masyarakat memberikan masukan ide ide yang relevan yang kemudian diintegrasikan ke dalam strategi pengembangan program PKH. Berikut pernyataan dari Haryanti selaku Kasi Kesra Kecamatan Jambangan

“Pihak kecamatan sangat terbantu dan apresiasi akan adanya partisipasi masyarakat dan pendamping PKH⁴³ Karena dengan adanya kinerja pendamping dan kesra kelurahan tidak akan bisa berjalan dengan baik dan akan selalu berkesinambungan dengan masyarakat penerima bantuan PKH.” (wawancara : 25 April 2024)

Berikut juga pernyataan dari Yuni selaku Masyarakat Penerima PKH

“Partisipasi saya membantu pendamping PKH dalam proses monitoring dengan melaporkan penyimpangan yang terjadi di survei lapangan serta mendukung kegiatan sosialisasi dengan mengajak masyarakat lain yang terlibat bantuan PKH dan menyebarkan informasi tentang program PKH.” (wawancara : 17 Mei 2024)

Namun pernyataan yang sama disampaikan oleh Devita selaku Pendamping PKH

“Kalau partisipasi kami (pendamping) dengan masyarakat biasanya koordinasi dengan RT RW setempat guna untuk melakukan proses monitoring ke rumah penerima bantuan. Terkadang ya mas ada kegiatan

RT RW gitu kita diundang dan diikutsertakan agar mempermudah proses monitoring dengan masyarakat.” (wawancara : 26 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa keterlibatan masyarakat dengan pendamping PKH tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk bertanggung jawab atas keberhasilan PKH. Dengan peran partisipasi masyarakat dan pendamping PKH, program PKH dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal sehingga mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan serta memastikan bantuan PKH yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat.

b. Berpartisipasi dalam proses perencanaan program PKH

Keberhasilan program PKH ini sangat penting akan partisipasi masyarakat dan pendamping dalam proses perencanaan untuk memastikan efektivitas dan relevansi program PKH. Program PKH lebih responsif dan tepat sasaran karena adanya masyarakat yang berpartisipasi dengan berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata di lingkungan. Namun pendamping PKH berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan komunikasi antara penerima manfaat dengan pengelola program serta membantu mengidentifikasi masalah penting dan kebutuhan khusus yang mungkin terlewatkan jika masyarakat tidak terlibat partisipasi secara langsung. Berikut pernyataan dari responden Tutik selaku Masyarakat Penerima Bantuan

“Saya diundang mas sama Pak RT dalam sosialisasi di kelurahan yang di fasilitasi sama tim pendamping PKH. Dalam sosialisasi tersebut, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang terjadi sehari-hari gitu nanti semua masukannya dicatat dan dibahas seksama begitu mas.” (wawancara : 13 Mei 2024)

Berikut pernyataan serupa disampaikan oleh Ari selaku Tim Pendamping PKH

“Memang pertemuan sosialisasi ini adalah bentuk kami (pendamping) mengumpulkan informasi secara langsung dari masyarakat dan kami juga melakukan survei untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi ekonomi sosial keluarga penerima manfaat.” (wawancara : 26 April 2024)

Berikut juga pernyataan dari Haryanti selaku Kasi Kesra Kecamatan Jambangan

“Kami (kecamatan) berperan penting dalam memastikan program PKH ini berjalan dengan efektif dan tetap sasaran. Partisipasi kami bekerja sama dengan pendamping PKH untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan dari masyarakat.” (wawancara : 25 April 2024)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut bahwa kolaborasi yang terjalin antara pihak kecamatan, pendamping PKH, dan masyarakat menciptakan suatu dinamika triangulasi yang sangat penting. Pihak kecamatan berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dengan realitas kebutuhan masyarakat di lapangan, sedangkan pendamping PKH sebagai mediator yang menghubungkan antara kecamatan dan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga dalam memberikan masukan dan identifikasi kebutuhan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa program PKH ini tidak hanya relevan akan tetapi juga efektif dengan memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat.

c. Berpartisipasi dan mendukung tujuan program PKH

Dalam pelaksanaan PKH, peran partisipatif kecamatan, pendamping PKH dan masyarakat sangat penting untuk mendukung tujuan program PKH tersebut. Kecamatan berperan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan PKH dan bertanggung jawab program ini mencapai tepat sasaran dan berdampak positif bagi keluarga penerima manfaat. Pendamping PKH berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat. Mereka tidak hanya menyediakan bantuan teknis, tetapi juga memberikan instruksi dan petunjuk tentang cara terbaik untuk memanfaatkan dana yang diberikan. Peran partisipasi masyarakat juga menjadi suatu keberhasilan PKH dan keterlibatan mereka tidak hanya mendukung tetapi juga memperkuat keberlanjutan program PKH secara keseluruhan. Berikut responden yang disampaikan oleh Haryanti selaku Kasi Kesra Kecamatan Jambangan

“Kami (kecamatan) sangat mendukung dan juga memfasilitasi program ini agar pendamping PKH bisa berkoordinasi dengan masyarakat penerima bantuan PKH.” (wawancara : 25 April 2024)

Berikut pernyataan juga yang disampaikan oleh Anjar selaku Masyarakat penerima bantuan

“Saya sangat mendukung dan berpartisipasi dalam program PKH tersebut. Kami juga memiliki forum KPM PKH guna untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman sesama antar lain. Dan juga saya mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pendamping PKH di kelurahan. Saya juga berpartisipasi dalam program sosial dan kegiatan sosial guna berdampak positif bagi lingkungan sosial sekitar.” (wawancara : 19 Mei 2024)

Berikut pernyataan serupa yang disampaikan oleh Dara selaku Pendamping PKH

“Kalau kami (pendamping) sangat mendukung dan berharap untuk kemungkinan yang ada di Indonesia ini berkurang dengan adanya PKH. Oleh karena itu, tujuan dari program PKH ini kan menanggulangi kemiskinan sehingga dari tahun ke tahun itu bisa berkurang mas.” (wawancara : 26 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan bahwa melalui kolaborasi partisipatif²¹ antar ketiga pihak ini sangat berperan penting dan bersinergis, sehingga tujuan dari program PKH ini untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat tercapai dan lebih efektif dan berkelanjutan, dan juga memastikan program ini berdampak positif bagi keluarga penerima manfaat secara meluas dan merata.

4.2.3. Peran Pasif

a. Kurangnya keterlibatan dalam program pelatihan atau penyuluhan terkait program PKH

Dengan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program penyuluhan atau pelatihan terkait PKH di Kecamatan Jambangan menjadi suatu tantangan yang perlu diperhatikan. Peneliti melihat hasil observasi menunjukkan sebagian masyarakat kurang aktif dalam mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang telah disediakan dan difasilitasi oleh pendamping PKH. Keterlibatan yang rendah dalam pelatihan atau sosialisasi dapat menghambat efektivitas program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat secara maksimal. Berikut pernyataan respon dari Haryanti selaku Kasi Kesra Kecamatan Jambangan

“Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dari sosialisasi atau pelatihan yang diadakan. Selain itu, waktu pelaksanaan yang tak fleksibel dikarenakan banyak masyarakat yang harus bekerja atau mengurus keluarganya mas.”
(wawancara : 25 April 2024)

Berikut juga pernyataan dari Dara selaku Tim Pendamping PKH
“Kami (pendamping) sudah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan partisipasi. Kami sudah berkoordinasi dengan RT RW setempat untuk memberitahukan informasi sosialisasi tentang program PKH serta kami sudah mengatur jadwal pelaksanaan yang fleksibel agar masyarakat banyak yang bisa hadir.” (wawancara : 26 April 2024)

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Yuni selaku Masyarakat Penerima Bantuan PKH

“Kalau informasi saya selalu dapat dari informasi grup pak RT mas cuman karena jadwal dan waktu pelaksanaan sosialisasinya yang sulit mas kan saya juga lagi kerja sampe sabtu jadinya tidak bisa hadir untuk mengikuti sosialisasi tersebut.” (wawancara : 17 Mei 2024)

Berikut hasil observasi dan wawancara bahwa terdapat 3 faktor kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program pelatihan atau penyuluhan terkait PKH yakni informasi dan kesadaran masyarakat. Banyak keluarga penerima manfaat tidak mendapatkan pemberitahuan yang jelas dan tepat waktu tentang jadwal dan lokasi pelatihan karena informasi yang tidak efektif. Dan jadwal kegiatan yang sering kali tidak sesuai dengan waktu luang masyarakat memperparah kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelatihan.

b. Cenderung hanya mengandalkan bantuan dari program PKH

Di Kecamatan Jambangan, ada beberapa keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang hanya bergantung pada bantuan yang mereka terima tanpa berusaha meningkatkan kemandirian keuangan mereka. Observasi menunjukkan bahwa banyak dari keluarga ini kurang terlibat dalam program pelatihan atau penyuluhan yang bertujuan untuk mengajarkan mereka cara mengelola keuangan dan mencari sumber pendapatan tambahan.

Akibatnya, manfaat jangka panjang dari PKH, seperti peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, belum sepenuhnya terealisasi di masyarakat. Untuk mengatasi kecenderungan ini, pendamping PKH dan pihak terkait harus melakukan upaya yang lebih intens untuk mendidik dan mendorong keluarga penerima manfaat untuk menjadi mandiri. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Haryanti selaku Kasi Kesra Kecamatan Jambangan

“Di kecamatan Jambangan untuk bantuan PKH, semakin berkurang karena adanya penindaklayaan. Jadi, bagi masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria itu akan kami cleansing atau hilang dari aplikasi gamis.” (wawancara : 25 April 2024)

Pernyataan respon yang disampaikan oleh Devita selaku Pendamping PKH

“Kami (pendamping) merasa prihatin dan ada kecenderungan seperti itu di beberapa keluarga penerima manfaat. Banyak masyarakat merasa bantuan yang mereka terima sudah cukup bagi mereka, dan mereka tidak termotivasi untuk mencari cara lain untuk meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Selain itu, kami juga mengadakan diskusi sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebutuhan mereka dan bagaimana kami dapat membantu mereka dengan lebih baik. (wawancara : 26 April 2024)

Pernyataan respon yang disampaikan oleh Tutik selaku Masyarakat Penerima Bantuan PKH

“Menurut pendapat saya, banyak keluarga merasa bahwa bantuan dari PKH sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, mungkin mereka belum melihat atau merasakan manfaat langsung dari pelatihan atau penyuluhan yang ditawarkan, sehingga mereka lebih memilih mengandalkan bantuan tunai yang diterima secara rutin.” (wawancara : 13 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya di Kecamatan Jambangan kecenderungan masyarakat yang hanya mengandalkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat hanya ketergantungan pada bantuan PKH. Hal ini ketergantungan pada bantuan muncul karena bantuan PKH dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mengurangi motivasi untuk mencari sumber pendapatan tambahan atau mengikuti pelatihan.

c. Kurangnya inisiatif dalam mencari informasi tentang program PKH

Di kecamatan Jambangan masih ada beberapa masyarakat kurangnya inisiatif dalam mencari informasi tentang program PKH. Beberapa keluarga penerima manfaat cenderung pasif dan hanya menunggu informasi datang ke mereka tanpa berusaha aktif mencari tahu lebih lanjut tentang sosialisasi atau pelatihan program PKH. Berikut pernyataan dari Haryanti selaku Kasi Kesra Kecamatan Jambangan

“Kami (kecamatan) menyadari bahwa informasi tentang PKH sangat penting untuk mencapai tujuan program PKH, sehingga kami berkoordinasi dengan pendamping dan masyarakat untuk memastikan informasi tersebut tersampaikan dengan baik.” (wawancara : 25 April 2024)

Pernyataan serupa yang disampaikan oleh Ari selaku Pendamping PKH

“Upaya kami (pendamping PKH) hanya mensosialisasi tentang program PKH kepada masyarakat serta mengkoordinasi dengan RT RW untuk membantu menyebarluaskan informasi ke masyarakat penerima bantuan PKH.” (wawancara : 26 April 2024)

Pernyataan dari Anjar selaku Masyarakat Penerima Bantuan PKH

“Untuk mencari informasi saya dapat informasi nya dari grup RT tentang sosialisasi program PKH di kelurahan.” (wawancara : 19 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa terdapat beberapa faktor, termasuk rendahnya tingkat literasi informasi, kepercayaan yang berlebihan bahwa informasi penting akan selalu disampaikan secara langsung oleh pendamping PKH, serta asumsi bahwa bantuan yang diterima sudah mencukupi kebutuhan mereka tanpa perlu penambahan pengetahuan atau keterampilan. Akibatnya, banyak kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program PKH tidak digunakan dengan baik. Untuk mengatasi hal ini, kecamatan harus lebih proaktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan membuat akses informasi menjadi lebih mudah dan menarik.

4.2.4. Peran Ideal

a. Mengembangkan inisiatif bersama terhadap program PKH

Di Kecamatan Jambangan, ada inisiatif yang berkembang antara kecamatan, pendamping PKH, dan 56 masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan penyebaran informasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam upaya inisiatif ini, pihak kecamatan dan pendamping PKH bertemu secara rutin untuk mengatur kegiatan sosialisasi yang lebih efisien. Ketua RT/RW juga aktif menyebarkan informasi melalui berbagai media, seperti grup WhatsApp. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Haryanti selaku Kasi Kesra Kecamatan Jambangan

“Kami tahu bahwa informasi tentang PKH sangat penting untuk mencapai tujuan program, jadi kami bekerja sama dengan pendamping PKH dan masyarakat untuk memastikan informasi tersebut disampaikan dengan baik dan benar.” (wawancara : 25 April 2024)

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ari selaku Pendamping PKH

“Pasti ada inisiatif bersama. Dengan adanya bantuan PKH ini membuat masyarakat berinisiatif untuk mengembangkan program PKH untuk mensejahterakan keluarga penerima manfaat.” (wawancara : 26 April 2024)

Pernyataan serupa yang disampaikan oleh Tutik selaku Masyarakat Penerima Bantuan PKH

“Sebagai penerima bantuan PKH, saya berusaha untuk berkontribusi aktif pada program PKH melalui berbagai inisiatif. Saya membentuk kelompok-kelompok kecil di tingkat RT. Kelompok-kelompok ini biasanya berkumpul untuk membahas manfaat PKH dan berbagi informasi yang kami peroleh dari pendamping PKH. (wawancara : 13 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Di Kecamatan Jambangan, mengembangkan inisiatif bersama untuk Program Keluarga Harapan (PKH) membutuhkan kerja sama aktif antara kecamatan, pendamping PKH, dan masyarakat. Oleh karena itu, Kecamatan, Pendamping PKH, dan Masyarakat Penerima Bantuan PKH secara bersama-sama menciptakan lingkungan yang partisipatif dan terinformasi serta meningkatkan aksesibilitas dan relevansi PKH.

b. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang program PKH

Di Kecamatan Jambangan, ada perkembangan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Observasi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mulai menanggapi kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pendamping PKH secara teratur. Kecamatan turut mendukung dengan memfasilitasi penyebaran informasi. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Haryanti selaku Kasi Kesra Kecamatan Jambangan

“Kami (kecamatan) telah mengambil beberapa langkah penting. Kami mengadakan sosialisasi rutin di setiap kelurahan. Sosialisasi ini melibatkan pendamping PKH yang menjelaskan secara detail tentang tujuan dan manfaat program, serta memberikan panduan praktis tentang bagaimana memanfaatkan bantuan yang diterima.” (wawancara : 25 April 2024)

Pernyataan serupa yang disampaikan oleh Dara selaku Pendamping PKH *“Tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Jambangan sebenarnya sudah mulai nampak, terutama setelah berbagai upaya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh pendamping PKH dan pihak kecamatan.” (wawancara : 26 April 2024)*

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Anjar selaku Masyarakat Penerima Bantuan PKH

“Peran ideal saya sebagai masyarakat adalah menjadi penghubung antara pendamping PKH dan warga lain. Saya dapat membantu menyebarkan informasi yang saya terima dari pendamping PKH kepada tetangga dan teman-teman yang mungkin belum mengetahuinya. Selain itu, saya juga bisa berperan aktif dalam mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan penyuluhan yang diadakan.” (wawancara : 19 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa keterampilan dan pengetahuan masyarakat tentang program PKH ini sangatlah penting untuk mensejahterahkan perekonomian keluarga mereka. Namun kombinasi dari upaya-upaya ini telah menghasilkan peningkatan yang nyata dalam pemahaman dan keterampilan kepada keluarga penerima manfaat, yang kini lebih mampu

memanfaatkan bantuan PKH secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

c. Membantu dalam mengakses layanan pada program PKH

Di kecamatan Jambangan ini upaya membantu dalam mengakses layanan pada program PKH menunjukkan perkembangan yang efektif dan positif dan pendamping aktif berperan mendampingi keluarga penerima manfaat dalam setiap tahapan program, mulai dari pendaftaran hingga pencairan bantuan dana PKH. Selain membantu dalam pengisian formulir dan persyaratan administrasi lainnya, mereka memberikan instruksi yang jelas dan rinci tentang prosedur yang harus diikuti. Selain itu, kecamatan berpartisipasi secara aktif dengan menyediakan posko informasi di mana masyarakat dapat mengajukan pertanyaan dan keluhan terkait PKH. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Haryanti selaku Kasi Kesra Kecamatan Jambangan

“Kami melakukan pemantauan berkala melalui kunjungan rumah yang dilakukan oleh pendamping PKH. Pendamping akan melaporkan kepada kami jika ada keluarga yang mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan tambahan. Selain itu, kami memiliki sistem pengaduan yang memungkinkan peserta PKH melaporkan masalah mereka secara langsung kepada pihak kecamatan.” (wawancara : 25 April 2024)

Pernyataan yang disampaikan oleh Devita selaku Pendamping PKH

“Kalau untuk masyarakat itu sangat berpartisipasi dalam akses layanan program tersebut namun juga pihak kecamatan sangat membantu dan mendukung dalam akses layanan PKH. Sejak adanya filterisasi dari musyawarah kelurahan itu kami (pendamping) sangat aman dan terkendali terhadap akses layanan program PKH.” (wawancara :26 April 2024)

Pernyataan serupa yang disampaikan oleh Yuni selaku Masyarakat Penerima Bantuan PKH

“Dampak yang diberikan sangat positif mas. Banyak masyarakat yang awal mula tidak tahu tentang program PKH untuk sekarang lebih terinformasi dan berpartisipasi aktif dalam program ini dan lebih mudah mendapatkan berbagai informasi dari sosialisasi dan pelatihan.” (wawancara : 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dengan upaya inisiatif masyarakat dalam membantu akses layanan PKH ini sangat berdampak positif bagi keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga memastikan KPM ini mengakses layanan PKH lebih mudah, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, banyak keluarga penerima manfaat ini merasa terbantu dan dapat memanfaatkan bantuan PKH secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Peran Aktif

Dalam peran aktif program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Jambangan ini bisa menganalisa melalui teori peran menurut Soerjono Soekanto dengan melihat bagaimana peran aktif sosial berkontribusi dalam pencapaian tujuan program. Peran aktif yang dimaksud adalah mencakup perilaku atau kontribusi dari seseorang dalam suatu posisi sosial. Dalam kondisi program PKH terdapat 3 kelompok peran yakni pihak kecamatan, pendamping PKH, dan masyarakat yang memiliki peran aktif masing-masing untuk saling melengkapi dan bersinergi.

Pihak kecamatan berperan aktif sebagai fasilitator dan koordinator untuk memastikan program PKH ini berjalan sesuai rencana dengan menyediakan informasi tentang PKH, memonitor pelaksanaan, dan memfasilitasi akses layanan. Namun, pendamping PKH ini berperan sebagai mediator dan motivator yang membantu keluarga penerima manfaat dengan memahami dan memanfaatkan bantuan dengan efektif serta juga mengedukasi kepada masyarakat tentang penggunaan manfaat bantuan PKH secara produktif. Masyarakat dengan sebagai Keluarga Penerima Manfaat berperan aktif dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan di kelurahan yang difasilitasi oleh pihak kecamatan dan pendamping PKH.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa analisis menunjukkan sejauh mana setiap pihak memahami dan menjalankan peran mereka sesuai dengan ekspektasi sosial yang ada sangat mempengaruhi keberhasilan PKH di Kecamatan Jambangan. Kolaborasi yang bersinergi dan berkesinambungan antara pihak kecamatan, pendamping PKH dan masyarakat menghasilkan sinergi yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi PKH.

4.3.2 Peran Partisipatif

Dilihat dari peran partisipasi ketiga pihak yakni pihak kecamatan, pendamping dan masyarakat sangat berpartisipasi terhadap program PKH di kecamatan Jambangan. Peran partisipatif ketiga pihak dengan melihat dari fokus pada 3 indikator yakni partisipasi masyarakat dengan pendamping PKH dalam pengembangan PKH, berpartisipasi dalam proses perencanaan PKH, dan berpartisipasi dan mendukung tujuan PKH.

Partisipasi masyarakat dengan pendamping PKH dalam mengembangkan PKH ini terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh pendamping PKH di kelurahan. Sehingga pendamping PKH berperan sebagai penghubung atau fasilitator yang menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan PKH. Masyarakat dan pihak kecamatan bekerja sama dalam proses perencanaan PKH untuk memastikan bahwa program disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kecamatan mengadakan pertemuan di mana masyarakat berkumpul untuk menyampaikan keinginan dan kebutuhan mereka. Sebagai koordinator, kecamatan memasukkan masukan ini ke dalam perencanaan program untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil relevan dan efektif bagi penerima manfaat. Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan bantuan secara efektif dan berkelanjutan menunjukkan partisipasi dan dukungan terhadap tujuan PKH. Mereka melihat PKH sebagai peluang untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan dalam jangka panjang, bukan hanya bantuan sementara. Sementara pihak kecamatan memastikan dukungan administratif dan logistik berjalan lancar, pendamping PKH terus memberikan bimbingan dan motivasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa keberhasilan PKH di Kecamatan Jambangan berdasar pada sinergi peran partisipasi yang dijalankan oleh ketiga pihak. Pihak kecamatan yang berperan sebagai koordinator, pendamping PKH berperan sebagai mediator dan fasilitator, dan juga masyarakat penerima manfaat berperan sebagai penerima manfaat yang aktif memberikan umpan balik dan berkontribusi dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan. Oleh karena itu, dengan adanya peran partisipasi dari ketiga pihak akan membuat program ini berjalan sesuai pencapaian tujuan PKH dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan.

4.3.3 Peran Pasif

Dengan melihat peran pasif PKH di kecamatan Jambangan ini menunjukkan bahwa beberapa masyarakat belum menjalankan perannya dengan baik. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang terjadi pada pihak kecamatan dan pendamping PKH untuk mengidentifikasi penyebab masyarakat berperan pasif terhadap program PKH di kecamatan Jambangan. Peran pasif ini dapat dilihat dari masyarakat kurangnya keterlibatan dalam program pelatihan atau penyuluhan terkait PKH, beberapa masyarakat cenderung hanya mengandalkan bantuan dari PKH dan juga kurangnya inisiatif masyarakat dalam mencari informasi tentang PKH.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program pelatihan atau penyuluhan terkait PKH menunjukkan bahwa masyarakat cenderung pasif dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat membantu mereka menjadi lebih mandiri. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya terlibat dalam proses pengembangan diri yang diharapkan dari mereka. Beberapa masyarakat di Kecamatan Jambangan cenderung bergantung pada bantuan PKH, tetapi mereka tidak berusaha untuk menggunakan dana tersebut dengan cara yang menguntungkan. Mereka tidak berusaha mencari lebih banyak pendapatan uang atau keterampilan baru, tetapi melihat PKH sebagai sumber bantuan utama yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perilaku ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi dan ketidakmampuan untuk menjalankan peran yang lebih proaktif dan mandiri yang diharapkan dari penerima manfaat PKH. Kurangnya upaya atau inisiatif dari masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang PKH juga menunjukkan sikap pasif. Banyak masyarakat tidak berusaha mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk memaksimalkan manfaat program ini, baik melalui pendamping PKH maupun sumber lain. Mereka menunjukkan perbedaan antara perilaku aktual mereka dan peran yang diharapkan dengan menunggu informasi datang kepada mereka daripada aktif mencarinya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pihak kecamatan dan pendamping menunjukkan bahwa peran pasif masyarakat sebagai penerima manfaat PKH mencakup partisipasi aktif dalam program, penggunaan bantuan secara produktif, dan inisiatif dalam mencari informasi yang diperlukan. Kurangnya keterlibatan dan inisiatif ini dapat menghambat pencapaian tujuan program PKH untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan keterampilan masyarakat agar mereka dapat menjalankan peran sosial mereka dengan lebih efektif sesuai dengan harapan dan tujuan program PKH.

4.3.4 Peran Ideal

Dengan melihat peran ideal pihak kecamatan, pendamping PKH dan masyarakat terhadap PKH ini bahwa dapat dilihat dari fokus indikator yakni mengembangkan inisiatif bersama terhadap PKH, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang PKH, dan membantu dalam mengakses layanan pada PKH. Hal ini menunjukkan bahwa mengidentifikasi yang kolaborasi efektif untuk mendukung keberhasilan program PKH tersebut.

Peran ideal kecamatan yang berperan sebagai mengembangkan inisiatif bersama dengan pendamping PKH dan masyarakat dalam merancang dan menjalankan program PKH. Ini termasuk berpartisipasi secara aktif dalam menyusun rencana, mengalokasikan sumber daya, dan mendorong kolaborasi antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Namun, pendamping PKH memiliki peran ideal dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat terkait PKH dengan mengembangkan program pelatihan yang relevan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan serta membantu masyarakat memahami betapa pentingnya memanfaatkan bantuan secara efektif dan mandiri. Penting bagi masyarakat untuk membantu PKH dengan memberikan mereka akses ke layanan yang disediakan oleh program ini. Diharapkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pencarian informasi, mengikuti pelatihan, dan menggunakan bantuan secara efektif. Oleh karena itu, mereka tidak hanya berfungsi sebagai penerima manfaat passif tetapi juga berperan sebagai aktor perubahan yang aktif dalam mencapai tujuan PKH.

Berdasarkan melihat hasil observasi dan wawancara bahwa peran ideal pihak kecamatan, pendamping PKH, dan masyarakat ini dengan melihat upaya bersama yang efektif dari ketiga pihak adalah salah satu kunci keberhasilan program PKH sehingga memungkinkan untuk pencapaian tujuan PKH yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini menjadikan peran ideal suatu interaksi sosial yang harmonis dan saling mendukung antar ketiga pihak untuk mencapai tujuan PKH secara seksama.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. ³⁶ Pendamping PKH memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Jambangan. Selain itu pendamping PKH juga memiliki peran aktif, partisipatif, pasif, dan ideal guna untuk berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan. Pendamping PKH berperan sebagai fasilitator antara pihak kecamatan dan masyarakat, memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Dengan adanya pendamping PKH dapat membantu menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan dan signifikan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di kecamatan Jambangan.

Berdasarkan uraian ha⁶ penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dinas Sosial Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. Dapat disimpulkan berdasarkan teori peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) mengenai 4 teori peran , sebagai berikut :

1. Peran Aktif

Dengan melihat dari beberapa indikator diantaranya; menyampaikan informasi tentang program PKH, mengikuti dan mendukung pelaksanaan program PKH, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan program PKH. Bahwa peran aktif yang dimaksud adalah mencakup perilaku atau kontribusi dari seseorang dalam suatu posisi sosial. Dalam kondisi program PKH terdapat 3 kelompok peran yakni pihak kecamatan, pendamping PKH, dan masyarakat yang memiliki peran aktif masing-masing untuk saling melengkapi dan bersinergi. Pihak kecamatan berperan aktif sebagai fasilitator dan koordinator untuk memastikan program PKH ini berjalan sesuai rencana dengan menyediakan informasi tentang PKH, memonitor pelaksanaan, dan memfasilitasi akses layanan. Namun, pendamping PKH ini berperan sebagai mediator dan motivator yang membantu keluarga penerima manfaat dengan memahami dan memanfaatkan bantuan dengan efektif serta juga mengedukasi kepada

masyarakat tentang penggunaan manfaat bantuan PKH secara produktif. Masyarakat dengan sebagai Keluarga Penerima Manfaat berperan aktif dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan di kelurahan yang difasilitasi oleh pihak kecamatan dan pendamping PKH.

2. Peran Partisipatif

Dengan melihat dari beberapa indikator diantaranya; partisipasi masyarakat dengan pendamping PKH dalam pengembangan PKH, berpartisipasi dalam proses perencanaan PKH, dan berpartisipasi dan mendukung tujuan PKH. Bahwa keberhasilan PKH di Kecamatan Jambangan berdasar pada sinergi peran partisipasi yang dijalankan oleh ketiga pihak. Pihak kecamatan yang berperan sebagai koordinator, pendamping PKH berperan sebagai mediator dan fasilitator, dan juga masyarakat penerima manfaat berperan sebagai penerima manfaat yang aktif memberikan umpan balik dan berkontribusi dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan. Oleh karena itu, dengan adanya peran partisipasi dari ketiga pihak akan membuat program ini berjalan sesuai pencapaian tujuan PKH dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan.

3. Peran Pasif

Dengan melihat dari beberapa indikator diantaranya; kurangnya keterlibatan dalam program pelatihan atau penyuluhan terkait PKH, beberapa masyarakat cenderung hanya mengandalkan bantuan dari PKH dan juga kurangnya inisiatif masyarakat dalam mencari informasi tentang PKH. Beberapa masyarakat berperan pasif dengan tidak terlibat dalam program pelatihan atau penyuluhan terkait PKH. Beberapa dari mereka hanya bergantung pada bantuan PKH tanpa berusaha mencari atau menciptakan peluang lain untuk meningkatkan kehidupan mereka. Kurangnya inisiatif untuk mencari tahu tentang PKH juga merupakan bukti peran pasif mereka dalam program ini.

4. Peran Ideal

Dengan melihat dari beberapa indikator diantaranya ; mengembangkan inisiatif bersama terhadap PKH, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang PKH, dan membantu dalam mengakses layanan pada PKH. Hal ini menunjukkan bahwa mengidentifikasi yang kolaborasi efektif untuk mendukung keberhasilan program PKH tersebut. Bahwa peran ideal dari ketiga pihak ini adalah menciptakan sinergi yang harmonis pada kecamatan, pendamping PKH, dan masyarakat berkolaborasi dengan efektif. Peran ideal kecamatan yang berperan sebagai mengembangkan inisiatif bersama dengan pendamping PKH dan masyarakat dalam merancang dan menjalankan program PKH. pendamping PKH memiliki peran ideal dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat terkait PKH dengan mengembangkan program pelatihan yang relevan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan serta membantu masyarakat memahami betapa pentingnya memanfaatkan bantuan secara efektif dan mandiri. Penting bagi masyarakat untuk membantu PKH dengan memberikan mereka akses ke layanan yang disediakan oleh program ini. Diharapkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pencarian informasi, mengikuti pelatihan, dan menggunakan bantuan secara efektif. Oleh karena itu, mereka tidak hanya berfungsi sebagai penerima manfaat passif tetapi juga berperan sebagai aktor perubahan yang aktif dalam mencapai tujuan PKH.

- b.** Faktor pendukung bagi Dinas Sosial dalam pelaksanaan PKH di kecamatan jembangan diantaranya adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah, alokasi anggaran yang memadai, serta ikatan kerjasama yang baik dengan pihak kecamatan, pendamping PKH, dan masyarakat penerima manfaat. Dengan adanya dukungan teknologi informasi juga mempermudah proses verifikasi dan monitoring penerima manfaat, serta memastikan bantuan tepat sasaran. Namun, terdapat faktor penghambat yang perlu di atasi yakni kendala administratif dalam pendataan dan distribusi bantuan PKH, tingkat pendidikan dan kesadaran yang rendah pada kalangan masyarakat penerima manfaat, ketidaktepatan sasaran bantuan yang disebabkan oleh data yang kurang akurat, serta resistensi

perubahan dari masyarakat yang pasif dalam mengikuti program sosialisasi.

28

5.2 Saran

Dari uraian kesimpulan di atas ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk kedepannya, yakni sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi berkala guna untuk menilai efektivitas program dan peran masing-masing pihak. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengukur dampak nyata dari PKH dalam penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan dan memperbarui sistem manajemen data secara berkala
3. Pelatihan dan sosialisasi yang intensif perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat kesadaran yang rendah di kalangan keluarga penerima manfaat agar betapa pentingnya program PKH
4. Peningkatan akurasi data melalui verifikasi lapangan secara berkala
5. Perlu adanya pendekatan yang persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan partisipasi masyarakat

Bab 1,4,&5 Andre

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jdih.surabaya.go.id Internet Source	6%
2	bappeko.surabaya.go.id Internet Source	4%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	surabayakota.bps.go.id Internet Source	1%
5	www.jogloabang.com Internet Source	<1%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
7	123dok.com Internet Source	<1%
8	Muhammad Julian, Suyud Arief, Ahmad Mulyadi Kosim. "Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2021 Publication	<1%

9	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
10	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
11	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.merdeka.com Internet Source	<1 %
14	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
15	M. Adnan Lira. "The Father's Responsibility for the Fulfillment of Child Support Post-Divorce", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %
16	Pahrudin HM, Firdaus Firdaus. "PILKADA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: STUDI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAMBI PASCA PEMILIHAN GUBERNUR 2015", TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2021 Publication	<1 %
17	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
18	ebookformatpdfgratis-sedot.rhcloud.com Internet Source	<1 %

docobook.com

19	Internet Source	<1 %
20	sultrakini.com Internet Source	<1 %
21	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
23	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
24	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
25	jurnal.unitri.ac.id Internet Source	<1 %
26	palu.tribunnews.com Internet Source	<1 %
27	bisnis.tempo.co Internet Source	<1 %
28	suwiraputra.wordpress.com Internet Source	<1 %
29	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	<1 %
30	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %

31	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
32	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
33	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
34	Submitted to Universitas Tanjungpura Student Paper	<1 %
35	eprints.unmerbaya.ac.id Internet Source	<1 %
36	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
37	informatika.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
39	www.nature.or.id Internet Source	<1 %
40	abi.undana.ac.id Internet Source	<1 %
41	darahtuah.wordpress.com Internet Source	<1 %
42	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	<1 %
43	fr.slideshare.net Internet Source	<1 %

44	frangao.net Internet Source	<1 %
45	jakadpublisher.org Internet Source	<1 %
46	journal.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
47	readersblog.mongabay.co.id Internet Source	<1 %
48	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
49	www.insandesa.web.id Internet Source	<1 %
50	www.kemhan.go.id Internet Source	<1 %
51	www.opengovasia.com Internet Source	<1 %
52	www.ppid.batukota.go.id Internet Source	<1 %
53	www.scribd.com Internet Source	<1 %
54	www.tentangkita.co Internet Source	<1 %
55	www.voaindonesia.com Internet Source	<1 %

Nuraida Nuraida. "Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang", *The World of Public Administration Journal*, 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off